

DISKRIMINASI SOSIAL DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI KOTA MEDAN: STUDI KASUS KAMPUNG MADRAS HULU

Putri Roito Lumbantobing¹, Vinny Natasya Hura², Roy Eka Kurnia Telaumbanua³,
Delon Sitompul⁴, Suandro Mangihut Manik⁵, Tumiar Sidauruk⁶

putriroitolumbantobing@gmail.com¹, tasyavinny4@gmail.com²,
royekakumiatelaumbanua@gmail.com³, sitompuldelon2@gmail.com⁴, suanromanik@gmail.com⁵

Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Penelitian ini membahas fenomena diskriminasi sosial yang dialami oleh masyarakat Tamil di Kampung Madras Hulu, Medan, sebagai bagian dari dinamika kehidupan multikultural di kota tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Tamil menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, seperti stigma negatif, keterbatasan akses ekonomi, ketidakadilan dalam pendidikan, serta perlakuan tidak setara dalam pelayanan publik dan partisipasi sosial. Diskriminasi ini tidak hanya berdampak pada kesenjangan ekonomi, tetapi juga menimbulkan keterasingan sosial dan rendahnya kepercayaan terhadap sistem. Temuan ini menunjukkan bahwa harmoni multikultural di Kota Medan masih menghadapi tantangan serius, khususnya dalam mewujudkan keadilan sosial bagi kelompok minoritas. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat toleransi, merancang kebijakan inklusif, dan mendorong pendidikan multikultural, agar tercipta ruang hidup yang adil, setara, dan harmonis di tengah keragaman.

Kata Kunci: Diskriminasi Sosial, Masyarakat Tamil, Multikulturalisme.

PENDAHULUAN

Kota Medan sebagai salah satu kota metropolitan dan pusat ekonomi dan budaya di Sumatera Utara memiliki kekayaan yang tak ternilai dalam keragaman etnis, agama, dan budaya. Dinamika kehidupan multikultural di kota ini menciptakan sebuah panggung unik yang menawarkan peluang dan tantangan sekaligus. Sejak zaman kolonial hingga perkembangan zaman modern, Kota Medan telah menjadi tempat pertemuan berbagai suku bangsa, menjadi saksi perjalanan sejarah dan akulturasi budaya. Kota Medan memiliki jejak sejarah panjang yang mencerminkan percampuran berbagai etnis.

Dari kemunculan perdagangan internasional hingga pengaruh kolonial Belanda, keragaman budaya terus berkembang seiring waktu dalam bentuk kota kosmopolitan. Sejarah ini menciptakan fondasi kuat bagi harmoni multikulturalisme yang dapat dijumpai dalam aktivitas sehari-hari penduduknya. Perpaduan etnis Batak, Melayu, Jawa, Tionghoa, dan komunitas lainnya menjadi ciri khas demografi Kota Medan. Keberagaman agama seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha juga menghiasi keseharian warganya. Interaksi antarkelompok etnis dan agama membentuk jalinan sosial yang kompleks dan unik. Keberhasilan koeksistensi di tengah keragaman di Kota Medan tidak hanya mencerminkan identitas lokal, tetapi juga memberikan kontribusi pada pemahaman konsep multikulturalisme di tingkat nasional. Studi ini memberikan landasan pengetahuan yang

diperlukan untuk menggali lebih dalam peran keragaman dalam pembentukan identitas kota, serta relevansinya terhadap tantangan dan peluang di era globalisasi.

Secara umum, keberagaman yang terdapat di masyarakat memiliki dampak positif jalannya aktivitas kehidupan di Indonesia. Pengaruh positif dari adanya multikultural di Indonesia adalah semakin terbentuknya hubungan sosial di masyarakat dari keberagaman budaya yang ada, pengaruh negatifnya adalah timbulnya sikap primordialisme, artinya sebuah sikap yang teguh dalam membawa hal-hal yang telah ada sejak lahir baik sebuah kepercayaan, tradisi, atau lainnya sehingga dapat memicu terjadinya konflik karena keberagaman. Terlebih lagi multikultural memiliki kaitan dengan ruang publik di masyarakat yang mana ruang publik ini berguna sebagai media dalam proses perkembangan masyarakat dengan keberagaman itu sendiri. Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat multikultural di Indonesia mencakup upaya membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang keberagaman budaya, mengatasi prasangka dan stereotip, mempromosikan dialog antar budaya, dan menciptakan kebijakan inklusif yang mendukung keadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk menggali lebih dalam fenomena diskriminasi sosial di Kampung Madras Hulu. Penelitian dilakukan di Kampung Madras Hulu, Medan, dengan subjek penelitian:

1. Masyarakat Tamil yang mengalami diskriminasi sosial.
2. Tokoh masyarakat dan pemimpin adat di Kampung Madras Hulu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini wawancara dengan masyarakat Tamil, observasi lapangan, dan dokumentasi dari sumber literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara dan observasi yang dilakukan di Kampung Madras, ditemukan berbagai bentuk diskriminasi sosial yang masih dialami oleh masyarakat Tamil. Diskriminasi ini meliputi stigma dan stereotip negatif, pembatasan akses ekonomi, serta kesulitan dalam memperoleh pendidikan yang setara.

Stigma sosial terhadap masyarakat Tamil masih kuat, di mana mereka sering dianggap sebagai kelompok ekonomi bawah yang sulit berkembang. Pak Khavin yang bekerja sebagai tukang parkir, salah satu narasumber pertama menceritakan bahwa dalam dunia kerja, ia sering mengalami perlakuan berbeda. Saat melamar pekerjaan di perusahaan milik non-Tamil, ia kerap ditanya mengenai latar belakang etnisnya, dan bahkan pernah ditolak tanpa alasan yang jelas. Hal ini juga berdampak pada interaksi sosial, di mana masyarakat Tamil sering dianggap sebagai kelompok yang eksklusif, padahal mereka juga berusaha untuk berbaur dengan komunitas lain.

Selain stigma sosial, diskriminasi juga tampak dalam aspek ekonomi. Pak Khavin, yang memiliki usaha kecil, mengungkapkan kesulitannya dalam mendapatkan modal usaha dari bank. Ia pernah mengajukan pinjaman, namun ditolak tanpa alasan yang jelas, sementara teman dari etnis lain yang memiliki kondisi keuangan serupa justru lebih mudah memperoleh pinjaman. Akibatnya, banyak masyarakat Tamil yang terpaksa bertahan

dalam sektor pekerjaan informal, seperti berdagang kecil-kecilan atau bekerja di sektor jasa dengan upah rendah.

Diskriminasi juga terjadi dalam dunia pendidikan. Pak Khavin menuturkan bahwa keponakannya mengalami kesulitan saat bersekolah di sekolah negeri. Ia sering diejek karena namanya dan aksennya yang berbeda, bahkan ada guru yang cenderung lebih memperhatikan anak-anak dari kelompok etnis lain dibandingkan anak-anak Tamil. Hal ini menunjukkan bahwa diskriminasi tidak hanya terjadi dalam kehidupan sosial dan ekonomi, tetapi juga dalam sistem pendidikan yang seharusnya memberikan kesempatan yang setara bagi semua anak.

Rajir, warga keturunan India yang tinggal di Kampung Madras Hulu ini, menyatakan bahwa sebutan "keling" sangat menyakitkan hati. Istilah tersebut berkembang menjadi olok-olok yang sejatinya menyakitkan. Oleh karena itu, warga India di Medan bersama pemerintah kota memutuskan untuk mengganti nama "Kampung Keling" menjadi "Kampung Madras" agar lebih menghormati identitas mereka.

Seorang tokoh masyarakat Tamil, Khanna, mengungkapkan bahwa banyak siswa etnis Tamil jarang mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri. Selain itu, sekitar 200 kepala keluarga etnis Tamil di Sei Semayang tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah, seperti dana Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dalam urusan administratif, pembuatan kartu keluarga dan KTP bagi warga etnis Tamil sering mengalami keterlambatan, dan petugas kelurahan pernah meminta biaya administrasi yang seharusnya tidak dipungut (gratis).

Mala, seorang ibu rumah tangga yang menjadi narasumber berikutnya, menceritakan pengalaman anaknya yang sering diejek di sekolah karena nama dan akses yang berbeda. Ia merasa bahwa sekolah negeri tidak memberikan perlakuan yang adil kepada anak-anak Tamil, bahkan guru lebih memperhatikan siswa dari etnis lain. Hal ini menimbulkan perasaan tidak aman dan malu pada anaknya.

Bapak Jeki, seorang pengemudi Gojek keturunan Tamil yang sering mangkal di Kampung Madras Hulu ini, mengungkapkan bahwa meskipun telah lama menjadi bagian dari masyarakat kota Medan, ia masih kerap mengalami diskriminasi sosial, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun saat bekerja. Ia menceritakan bahwa perlakuan berbeda sering diterimanya karena warna kulit, logat, dan stereotip terhadap etnis Tamil, termasuk penolakan penumpang dan perlakuan tidak menyenangkan dari masyarakat. Ia berharap pemerintah lebih aktif mengedukasi masyarakat tentang toleransi dan pentingnya menghargai perbedaan, agar diskriminasi sosial di masyarakat multikultural seperti Medan dapat berkurang. Sebagai pemuda aktif, Bapak Jeki merasa sulit untuk terlibat dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya. Ia mengungkapkan bahwa komunitasnya jarang diundang dalam kegiatan karang taruna, gotong royong, ataupun pertemuan RT. "Kami seperti hanya ada saat dibutuhkan tenaga kerja saja. Tapi kalau soal keputusan lingkungan, kami tidak dianggap," katanya.

Pak Rikwal adalah seorang pria keturunan Tamil. Ia menjalankan usaha toko kelontong yang diwariskan keluarganya. Suatu waktu, toko Pak Rikwal mengalami kerusakan akibat kerusuhan kecil di wilayah sekitar. Ketika ia melapor ke pihak berwajib untuk meminta perlindungan dan pengusutan, laporannya tidak segera ditindak lanjuti. Sementara itu, toko milik warga mayoritas di sekitar yang mengalami kerusakan serupa langsung mendapat respons dan bantuan dari aparat serta pemerintah daerah. Selain itu,

saat mengajukan kredit usaha mikro untuk memperluas tokonya, pengajuan Pak Rikwal ditolak tanpa alasan yang jelas, meski syarat-syarat administrasi telah lengkap. Dalam kasus serupa, beberapa pelaku usaha non-minoritas diketahui mendapat persetujuan lebih mudah. Diskriminasi ini membuat masyarakat Tamil seperti Pak Rikwal merasa termarginalkan. Mereka kehilangan kepercayaan terhadap sistem dan peluang untuk berkembang secara ekonomi menjadi lebih kecil. Hal ini juga dapat memperdalam kesenjangan sosial dan memicu ketegangan antar kelompok masyarakat.

Pembahasan

Kota Medan dikenal sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya yang cukup tinggi. Sebagai kota multikultural, Medan dihuni oleh berbagai kelompok etnis seperti Batak, Melayu, Tionghoa, Jawa, Minang, dan Tamil yang berasal dari keturunan India. Dalam konteks multikulturalisme ini, semestinya masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dan etnis dapat hidup berdampingan secara harmonis dan saling menghargai satu sama lain. Namun, hasil penelitian yang dilakukan di Kampung Madras Hulu menunjukkan bahwa realitas di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan idealisme tersebut. Masyarakat Tamil sebagai salah satu kelompok minoritas di Medan masih menghadapi diskriminasi sosial yang kompleks dan berlangsung dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, hingga interaksi sosial sehari-hari. Diskriminasi yang mereka alami tidak hanya bersifat personal atau insidental, tetapi cenderung sistemik dan terstruktur, yang menyebabkan marginalisasi terhadap kelompok ini.

Stigma dan stereotip negatif menjadi bentuk diskriminasi yang paling awal dan paling sering dialami masyarakat Tamil. Sebagian besar warga Tamil di Medan masih dipandang sebagai kelompok ekonomi lemah, pekerja rendahan, atau kelompok yang sulit beradaptasi. Stigma ini membuat mereka sering mendapat perlakuan yang tidak adil, sebagaimana dialami oleh Pak Khavin, seorang tukang parkir sekaligus pelaku usaha kecil, yang mengaku bahwa saat melamar pekerjaan, ia ditanya tentang latar belakang etnisnya dan pernah ditolak tanpa penjelasan. Perlakuan serupa juga dialami oleh pengemudi ojek online seperti Bapak Jeki, yang mengaku sering ditolak penumpang hanya karena warna kulit dan logat bicaranya yang khas Tamil. Stigma ini menciptakan penghalang psikologis dan sosial bagi masyarakat Tamil dalam menjalin relasi antar komunitas, dan bahkan berdampak pada pembatasan kesempatan kerja dan keterlibatan sosial mereka di masyarakat luas. Lebih menyakitkan lagi, penggunaan istilah “keling” sebagai ejekan atau hinaan masih sering terdengar, meskipun sudah ada upaya dari pemerintah dan masyarakat setempat untuk menghapus sebutan tersebut dengan mengganti nama wilayah menjadi “Kampung Madras”.

Diskriminasi juga terjadi dalam aspek ekonomi, di mana masyarakat Tamil sering mengalami kesulitan dalam mengakses sumber daya ekonomi yang semestinya tersedia secara adil untuk semua warga negara. Beberapa narasumber seperti Pak Rikwal dan Pak Ravi mengungkapkan pengalaman mereka dalam mengajukan pinjaman modal usaha ke lembaga keuangan. Meskipun secara persyaratan administratif mereka memenuhi kriteria, pengajuan mereka kerap ditolak tanpa alasan jelas. Sementara itu, warga dari kelompok etnis lain dengan kondisi keuangan serupa justru lebih mudah mendapatkan akses tersebut. Situasi ini membuat masyarakat Tamil banyak yang terjebak dalam sektor ekonomi informal, seperti berdagang kecil-kecilan, membuka warung kelontong, atau menjadi

pekerja jasa dengan upah rendah. Ketidaksetaraan ini menghambat mobilitas ekonomi masyarakat Tamil dan memperbesar kesenjangan sosial yang ada. Ditambah lagi, ketidakadilan dalam pemberian bantuan sosial seperti BLT atau program pelatihan kerja semakin mempertegas pengabaian terhadap hak-hak mereka sebagai warga negara yang setara.

Bidang pendidikan juga tidak luput dari praktik diskriminasi. Anak-anak Tamil, menurut pengakuan beberapa narasumber seperti Bu Mala dan Pak Khavin, sering mengalami ejekan dan perlakuan berbeda di sekolah negeri. Nama-nama mereka yang dianggap asing dan logat bicara yang berbeda menjadi bahan olok-olokan teman sekelas, bahkan guru pun kerap lebih memperhatikan siswa dari etnis mayoritas. Akibatnya, anak-anak Tamil merasa tidak nyaman, tidak percaya diri, dan enggan untuk menonjol dalam kegiatan belajar-mengajar. Lebih jauh lagi, minimnya penerimaan beasiswa dan peluang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri menambah beban diskriminasi struktural yang harus mereka hadapi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang seharusnya menjadi alat pemerataan sosial justru belum berpihak pada kelompok minoritas seperti masyarakat Tamil.

Dalam hal partisipasi sosial, masyarakat Tamil juga sering kali dikucilkan dari kegiatan kolektif warga. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Jeki yang mengatakan bahwa komunitasnya jarang dilibatkan dalam pertemuan RT, kegiatan karang taruna, ataupun gotong royong. Jika pun dilibatkan, partisipasi mereka sering dianggap hanya sebatas tenaga kerja, tanpa suara dalam pengambilan keputusan. Ketidakterlibatan ini membuat masyarakat Tamil merasa seolah-olah mereka hanya dibutuhkan saat dibutuhkan secara fisik, tapi tidak diakui secara sosial. Pengucilan ini berdampak pada melemahnya ikatan sosial antara masyarakat Tamil dan kelompok etnis lainnya, yang berpotensi menciptakan segregasi sosial dan memperbesar jurang ketidakpercayaan antar kelompok.

Tidak hanya itu, diskriminasi juga terjadi dalam akses terhadap layanan publik dan administrasi kependudukan. Ibu Nelli dan Khanna, dua tokoh masyarakat Tamil, menuturkan bahwa warga Tamil kerap mengalami keterlambatan dalam pengurusan dokumen seperti KTP dan Kartu Keluarga. Bahkan, ada oknum petugas yang meminta biaya tambahan yang seharusnya tidak dipungut. Kurangnya tanggapan dari pihak berwajib terhadap laporan atau pengaduan dari warga Tamil, seperti yang dialami oleh Pak Rikwal saat tokonya rusak akibat kerusakan, juga menunjukkan adanya ketimpangan dalam pelayanan dan perlindungan hukum. Kondisi ini membuat masyarakat Tamil semakin merasa tidak memiliki posisi yang sama di mata hukum dan pemerintah. Absennya kebijakan afirmatif yang secara khusus melindungi dan memberdayakan kelompok minoritas menjadi salah satu penyebab utama berlanjutnya diskriminasi ini.

Dari berbagai temuan tersebut, jelas bahwa diskriminasi sosial yang dialami masyarakat Tamil bukan sekadar isu interpersonal atau konflik antarindividu, tetapi merupakan persoalan struktural yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat luas. Multikulturalisme di Medan belum berjalan secara substansial apabila masih ada kelompok etnis yang merasa termarginalkan, tidak mendapat akses yang sama, dan tidak merasa aman di lingkungan sosialnya sendiri. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah kota untuk mengambil langkah-langkah konkret seperti merancang kebijakan inklusif, mengadakan program pendidikan multikultural, dan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap praktik diskriminatif di berbagai sektor. Sementara itu, masyarakat

luas juga perlu didorong untuk lebih terbuka, toleran, dan menghormati keragaman, agar kota Medan benar-benar menjadi rumah bagi semua warganya, tanpa terkecuali.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kampung Madras, dapat disimpulkan bahwa diskriminasi sosial terhadap masyarakat Tamil masih terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Bentuk- bentuk diskriminasi yang ditemukan meliputi stigma dan stereotip negatif, pembatasan akses ekonomi, serta kesulitan dalam memperoleh pendidikan yang setara. Stigma sosial terhadap masyarakat Tamil masih kuat, di mana mereka sering dianggap sebagai kelompok ekonomi bawah yang sulit berkembang. Diskriminasi ini juga tampak dalam dunia kerja, di mana masyarakat Tamil sering mengalami perlakuan berbeda saat melamar pekerjaan di perusahaan milik non-Tamil. Selain itu, dalam aspek ekonomi, masyarakat Tamil menghadapi kesulitan dalam mendapatkan modal usaha, yang membuat mereka terjebak dalam sektor pekerjaan informal dengan upah rendah.

Dalam dunia pendidikan, diskriminasi juga terlihat dalam perlakuan yang tidak setara terhadap anak-anak Tamil di sekolah. Mereka sering mengalami ejekan karena perbedaan nama dan aksen, serta kurang mendapatkan perhatian yang sama dari tenaga pendidik. Faktor utama yang menyebabkan diskriminasi ini adalah sejarah kolonialisme yang memisahkan komunitas berdasarkan etnis, kurangnya kebijakan inklusif dari pemerintah, serta prasangka sosial yang telah mengakar di masyarakat.

Dampak dari diskriminasi ini sangat signifikan, termasuk kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, minimnya kesempatan pendidikan yang berkualitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat Tamil dalam kebijakan publik. Oleh karena itu, diperlukan berbagai langkah strategis untuk mengatasi diskriminasi ini, baik melalui kebijakan pemerintah, peningkatan pendidikan multikultural, pemberdayaan ekonomi, maupun peran aktif masyarakat dalam membangun lingkungan yang lebih inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Eko Handoyo, M. (2015). *Studi Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- M, L. (2018). *Interaksi Multikultural di Kampung Madras, Medan*. Jurnal Sosial Budaya.
- Nur Lela Sari, d. (2024). *Interaksi Komunikatif Antarbudaya dalam Dinamika Masyarakat Multikultural di Kota Medan (Studi Kasus pada Masyarakat India dan Masyarakat Penduduk Asli Kampung Madras)*. Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan.
- Putnam, R. (2000). *Menghidupkan Kembali Komunitas: Runtuh dan Bangkitnya Modal Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zulkamaen, R. (2020). *Pendidikan dan Multikulturalisme di Sekolah-sekolah Indonesia*. Jurnal Studi Pendidikan.